

Polri, TNI dan Pemkot Beri Bantuan Pangan

SALATIGA (KR) - Polres Salatiga, Kodim 0714, Denpom dan Pemkot Salatiga memberi bantuan pangan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Argomulyo, Salatiga, Kamis (1/2). Kegiatan ini dalam rangka menanggulangi dampak terjadinya krisis pangan, pemerintah terus menggencarkan bantuan pangan kepada masyarakat.

Tidak kurang 120 karung pangan diterima warga sasaran. Penyerahan bantuan ini dilakukan oleh Kapolres Salatiga, AKBP Aryuni Novitasari, Pj Walikota Salatiga Yasip Khasani, Kasdim 0714 Mayor Hermanus, dan Dandenpom Salatiga Letkol Widodo.

Selain penyaluran bantuan sosial, disediakan pula pelayanan kesehatan gratis bagi warga sekitar yang merasa kurang sehat. Layanan kesehatan diberikan oleh Dokkes Polres Salaiga, yaitu pengecekan tekanan darah, pemberian vitamin dan konsultasi kesehatan.

Kapolres Salatiga, AKBP Aryuni Novitasari mengatakan paket bantuan ini merupakan bantuan dari pemerintah yang dibagikan 3 tahap. "Tahap pertama sebanyak 120 paket, selanjutnya masih ada paket bantuan yang akan salurkan berikutnya dengan sasaran masyarakat kota Salatiga," kata Aryuni.

Paket bantuan ini berisi minyak goreng 1 liter, snack, teh, gula 1 kilogram dan beras 5 kg. Paket sembako ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan dan berikutnya disalurkan di lokasi yang berbeda agar penyalurannya merata.

"Polres juga memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat dengan melakukan pengecekan tekanan darah, pemberian vitamin dan konsultasi kesehatan," katanya. **(Sus)-f**

KPU Sukoharjo Packing Logistik Pemilu

SUKOHARJO (KR) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukoharjo melakukan pengepakan atau tahap akhir packing logistik Pemilu 2024. Selanjutnya logistik tersebut akan dikirim ditingkat kecamatan.

Diharapkan tahapan tersebut sudah bisa diselesaikan pada awal bulan ini mengingat waktu pelaksanaan pemungutan suara sudah semakin dekat 14 Februari nanti.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukoharjo Syakbani Eko Raharjo, Kamis (1/2) mengatakan, pengepakan atau tahap akhir packing logistik Pemilu 2024 sudah mulai dilaksanakan KPU Sukoharjo sejak Sabtu (27/1) lalu dan sampai sekarang masih terus berlanjut. Total ada 35 orang pekerja ikut membantu proses tersebut.

Pengepakan atau tahap akhir packing logistik Pemilu 2024 dilakukan setelah tahapan sebelumnya berupa sortir dan pelipatan surat suara selesai dilaksanakan. Untuk tahap pengepakan atau tahap akhir packing logistik Pemilu 2024 ini dilakukan meliputi kotak suara DPRD, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten.

KPU Sukoharjo melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan tahapan pengepakan atau tahap akhir packing logistik Pemilu 2024. Petugas memantau langsung pekerja agar tidak terjadi kesalahan.

Nantinya setelah semua proses pengepakan atau tahap akhir packing logistik Pemilu 2024 selesai, KPU Sukoharjo akan langsung melakukan pengiriman ke tingkat kecamatan.

Sasaran utama dilakukan di wilayah yang jaraknya jauh seperti Kecamatan Kartasura, Kecamatan Gatak dan Kecamatan Baki. Sedangkan kecamatan lainnya menyusul berikutnya.

"Pengepakan atau tahap akhir packing logistik Pemilu 2024 ini kami target segera selesai awal Februari ini. Apabila sudah selesai maka langsung dikirim ke tingkat kecamatan," ujarnya. **(Mam)-f**

PPG FKIP Untidar Kukuhkan Guru Profesional

MAGELANG (KR) - Program Studi Pendidikan Profesi Guru (PPG) Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pengetahuan (FKIP) Universitas Tidar menggelar pengukuhan mahasiswa yang berhasil lulus pada pelaksanaan PPG dalam Jabatan Kategori 1 Angkatan II Tahun 2023 di Gedung Kuliah Umum HR Suparsono Untidar, Kamis (1/2).

Dekan Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pengetahuan (FKIP) Untidar Dr Ahmad Muhlisin MPd mengatakan bahwa 60 guru profesional lulus 100 persen, mereka terdiri 30 guru dari Bidang Pendidikan IPA dan 30 guru lainnya dari Bidang Bahasa Indonesia.

Diharapkan mereka bisa menjadi guru yang ilmuwan, ilmuwan yang guru. Ahmad Muhlisin juga berharap agar para guru yang sudah dikukuhkan lebih peka terhadap permasalahan pembelajaran yang harus diidentifikasi, sehingga menemukan solusi. "Tidak hanya berhenti disini, para guru tetap harus berinovasi dan belajar," tambah Dekan FKIP.

Rektor Untidar Prof Dr Sugiyarto MSI mengapresiasi kegiatan ini karena Untidar telah sukses menjalankan program ini, dan juga dapat menyelenggarakan kegiatan dengan baik.

Juga diucapkan selamat kepada para guru karena telah menyangdang profesionalitas yang sudah diakui negara. Rektor juga berpesan, sebagai alumni dimohon untuk mempromosikan Untidar kepada siswa dan siswinya.

Juga dikatakan, kalau semua sudah sah menjadi keluarga besar Untidar, berhak menjadi anggota Keluarga Alumni Untidar (Ganidar). "Dan jangan lupa dengan kewajiban keluarga Untidar, yaitu harus menjadi contoh untuk generasi-generasi berikutnya," kata Rektor Untidar. **(Tha)-f**



KR-Dokumen
Rektor Untidar bersama para mahasiswa yang lulus.



GEMA DPRD KAB. GROBOGAN

GROBOGAN (KR) - DPRD dan BKPPD Grobogan rencananya, Selasa (6/2) akan konsultasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) di Jakarta, terkait masalah 213 guru di daerah itu yang memenuhi nilai ambang batas atau passing grade pada seleksi PPPK 2023 tetapi sampai sekarang belum dapat penempatan. "Aspirasi 213 guru tersebut akan kami perjuangkan sampai ke Pemerintah Pusat. Rencananya 6 Februari 2024 BKPPD bersama DPRD akan audensi dengan KemenPAN-RB," ungkap Wakil Ketua DPRD Grobogan Sugeng Prasetyo, Jumat (2/2).

Menurut politisi Partai Gerindra asal Kecamatan Klambu ini, aspirasi yang disampaikan para guru tersebut akan diperjuangkan hingga ada keputusan yang jelas. Karena selain sudah memenuhi nilai ambang batas atau passing grade pada seleksi PPPK 2023, rata-rata mereka juga sudah mengabdikan 20 tahun menjadi guru yang setiap bulannya hanya mendapat gaji Rp 300.000.

Sementara itu Ketua DPRD Agus Siswanto, mengatakan masalah pengangkatan guru honorer menjadi PPPK juga pernah terjadi pada tahun 2021. Ketika itu ada 136 guru di Grobogan yang belum diangkat menjadi PPPK, namun akhirnya bisa diselesaikan.

"Untuk itu saya berharap kepada BKPPD dapat melakukan langkah serupa, sehingga segala tuntutan dari para guru honorer bisa diakomodir. Yang penting secara regulasi terpenuhi dan kami

akan melakukan pendampingan hingga keputusan ini selesai," tandas politisi PDIP asal Kecamatan Gubug.

Kepala BKPPD Padma Saputra menambahkan, selain akan konsultasi ke pemerintah pusat, pihaknya juga masih menunggu regulasi dari Kementerian PAN-RB. Jika Kementerian PAN-RB menginstruksikan seperti tahun 2021 lalu, pihaknya akan langsung menjalankan aturan yang ada. Diakuinya, sebelum ada regulasi dari Kementerian PAN-RB, pihaknya tidak bisa memprioritaskan guru honorer tersebut langsung bisa mengisi formasi PPPK tahun 2024. Terlebih tahun 2024 telah ada masukan sekitar 10 ribu formasi dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Grobogan, yang di dalamnya ada PNS

dan PPPK.

"Kami juga harus berkoordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah. Setelah itu baru diputuskan jumlah usulan formasi penerimaan calon ASN di tahun 2024," tambah Padma Saputra. Seperti diketahui, sebanyak 29 guru yang tergabung dalam Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta (FGPPNS) Grobogan, Senin lalu menemui DPRD setempat. Mereka mewakili 213 guru yang me-

enuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK 2023, tetapi sampai sekarang belum dapat penempatan. Koordinator FGPPNS, Tismarul Yaniah, minta agar pemerintah segera mengangkat menjadi PPPK.

Mereka juga mendesak agar Pemkab Grobogan membuka formasi penerimaan guru PPPK 2024 dengan jumlah banyak agar para guru yang memenuhi nilai ambang batas atau passing grade pada seleksi PPPK 2023 bisa terakomodir. **(Tas)-f**



KR-M Taslim
Sejumlah guru yang lolos passing grade seleksi PPPK 2023 mengadu ke DPRD Grobogan.

Sumarno AS Raih Penghargaan JWC Award 2024

MAGELANG (KR) - Dosen D3 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan (Fikes) Universitas Muhammadiyah Magelang (Unimma) Ns Sumarno Adi Subrata MKep PhD memperoleh penghargaan dari JWC Award 2024 di United Kingdom (UK) dalam kategori capaian riset dan publikasi di Pressure Ulcer Care.

Informasi yang diperoleh KR dari Humas Unimma, Kamis (1/2), menyebutkan event tahunan yang diselenggarakan Journal of Wound Care tersebut termasuk salah satu jurnal internasional bereputasi dan terindeks Scopus Q2 dan khusus mempublikasikan penelitian di bidang keperawatan luka.

Adi mengatakan, dalam JWC Award, panitia melaku-

kukan seleksi terhadap para peneliti di bidang perawatan luka dan akan memberikan nominasi kepada peserta dengan capaian yang outstanding. "Penilaian dengan mempertimbangkan beberapa hal, yaitu novelty riset atau original thinking, dampak ke populasi di wound care dan bukti capaian riset yang berupa publikasi internasional di jurnal yang reputable,"

katanya.

Dikatakan, strategi yang ditempuhnya selama ini selain dengan melakukan penelitian dan mempublikasikan hasil riset bidang perawatan luka di jurnal yang reputable dan terindeks Scopus, yaitu dengan mempromosikan hasil riset di beberapa academic social media seperti LinkedIn dan ResearchGate.

"Hal lain yang juga pen-



KR-Dokumen
Ns Sumarno Adi Subrata MKep PhD.

ting adalah membangun networking dan komunikasi yang baik dengan peneliti di luar negeri, contohnya fast response dalam membalas email, me-

lakukan kerjasama di bidang penelitian, sebagaimana yang pernah saya lakukan yaitu kolaborasi riset dengan Wound Market Consulting dari UK," tambahnya.

Seluruh pemenang akan diundang dalam acara Journal of Wound Care Conference di Imperial War Museum London, Jumat (23/2) mendatang. Adi berharap dengan prestasi tersebut dapat mengenal Unimma di level internasional, meningkatkan kualitas publikasi para dosen serta menambah academic networking dengan peneliti luar negeri. **(Tha)-f**

Karanganyar Tambah 21.979 Objek Pajak PBB

KARANGANYAR (KR) - Pemkab Karanganyar membagikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perkotaan dan per-

desaan (P2) tahun 2024 ke 478.731 obyek pajak. Jumlahnya bertambah 21.979 obyek pajak dibanding tahun 2023 sebanyak 456.752 obyek pajak.

Kepala Badan Keuang-



KR-Abdul Alim
Pj Bupati Karanganyar Timotius Suryadi membayarkan SPPT PBB P2 di mobile kas Bank Jateng.

an Daerah (BKD) Karanganyar, Kurniadi Maulato mengatakan kenaikan jumlah obyek PBB berkat pemutakhiran data obyek pajak.

Pemutakhiran ini menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Penda Karanganyar dari tahun ke tahun.

Rekomendasinya untuk meningkatkan akurasi data serta optimalisasi pemungutan PBB P2. Pada tahun 2023 lalu, telah dilaksanakan pemutakhiran data PBB P2 di wilayah Kecamatan Jaten dan Tasikmasu. Sedangkan di tahun ini, pemutakhiran-

nya di 15 wilayah kecamatan lainnya secara bertahap.

"Kenaikan obyek pajak memang banyak. Tapi perolehan nominalnya tidak terlalu signifikan. Meski begitu, rekomendasi BPK agar pemutakhiran data PBB P2 wajib dilakukan," kata Kurniadi, Jumat (2/2).

Pada tahun 2024, ketetapan PBB sebesar Rp 32.883.202.207 atau naik Rp1.403.501.361 dari ketetapan tahun 2023 Rp 31.479.702.846.

Kurniadi mengatakan seluruh SPPT PBB P2 tahun 2024 telah diserahkan ke mantri pajak di dusun dan kampung secara serentak pada launching bulan panutan pembayaran

PBB di pendopo rumah dinas Bupati Karanganyar, Kamis (2/2).

Pj Bupati Karanganyar Timotius Suryadi mengatakan pada tahun 2024 ini dimulainya implementasi aturan baru yaitu UU No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

UU itu erat kaitannya dengan pemungutan pajak dan retribusi daerah terutama dalam target waktu pembayaran PBB-P2 jatuh tempo pada Juni 2024.

"Kita mengimbau kepada para wajib pajak PBB-P2 untuk segera melaksanakan atau menunaikan kewajiban sebelum jatuh tempo 30 Juni 2024 ini untuk menghindari adanya denda," jelasnya. **(Lim)-f**

Bapas Klaten Luncurkan Aplikasi SIDIK

KLATEN (KR) - Dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi masyarakat, Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas II Kabupaten Klaten meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Digital Klien (SIDIK), di halaman Kantor Bapas Klaten, Rabu (31/1).

Kepala Bapas Kelas II Klaten, Enggelina Hukubun mengatakan aplikasi ini merupakan inovasi Bapas Klaten untuk membantu masyarakat khususnya klien Bapas Klaten dalam mengajukan permintaan Litmas secara online.

Menurutnya aplikasi ini juga telah terintegrasi dengan Automatic System Notification aplikasi pesan-pesan WhatsApp.

"Selain itu, aplikasi ini dapat digunakan untuk Pengiriman Permintaan Litmas, Hasil Litmas, dan koordinasi KoorGakum,"

kata Enggelina.

Selain peluncuran aplikasi SIDIK, dalam kegiatan ini juga digelar penandatanganan kerja sama pembentukan Griya Abhipraya Parahita.

Enggelina menjelaskan Griya Abhipraya Bapas klaten nantinya akan menjadi tempat dilaksanakannya pembimbingan terhadap klien secara berkelanjutan.

"Kami berharap dengan adanya kerjasama Polres Klaten terkait inovasi dari SIDIK dan Griya Abhipraya Bapas Klaten dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi penegakan hukum dan Restorative justice," jelas Enggelina pula.

Aplikasi SIDIK dan pembentukan Griya Abhipraya Parahita tersebut diluncurkan oleh Kepala Divisi Kemasyarakatan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jateng, Kadiyono. Kadiyono me-

nyampaikan apresiasinya terhadap penggunaan aplikasi tersebut.

Ia menyampaikan penggunaan aplikasi yang mudah diakses oleh masyarakat ini menunjang keterbukaan dan transparansi informasi.

"Aplikasi ini adalah bagian dari keterbukaan in-

formasi, transparansi, akuntabilitas, dan pembangunan zona integritas Kopja 6 peningkatan kualitas dan pelayanan," kata Kadiyono.

Dalam pelaksanaannya, Griya Abhipraya Parahita nantinya akan menjadi tempat dilaksanakannya pembimbingan terhadap

klien secara berkelanjutan berupa keterampilan sebagai bekal yang akan digunakan dalam bermasyarakat.

Kadiyono berharap melalui Griya Abhipraya Parahita, klien dapat lebih terampil dan membuka lebih banyak lapangan kerja. **(Sit)-f**



KR-Sri Warsiti
Launching aplikasi SIDIK.